

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Modal terhadap Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

Wa Nur Aisyah^{1*}, Junaidi², Siti Aminah Anwar³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : nuraisyahmusafiiii@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Local Own-Source Revenue (PAD) and Capital Expenditure on the financial performance of the Regional Government of Central Maluku Regency. The research method used is quantitative with a causal associative approach. The data used are secondary data obtained from the financial reports of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Central Maluku Regency over 11 years. The analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that PAD has a positive and significant effect on regional financial performance, while capital expenditure has a negative and significant effect. Simultaneously, PAD and capital expenditure significantly influence the financial performance of the regional government. These findings imply that strengthening the region's capacity to increase local revenues is crucial, but capital expenditure allocation must be managed more effectively and efficiently to enhance financial performance.

Keywords: *Local own-source revenue, capital expenditure, financial performance, regional government, central maluku.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah.

Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat, oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim dan Kusufi, 2016:31).

Kinerja keuangan pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kinerja keuangan pemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran, bentuk dan pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan. Undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembiayaan Pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, adil dan transparan. Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri dari belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Menurut penelitian Yuliasti, dkk (2018), pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), belanja modal (X_2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (Y), dan secara bersama-sama pendapatan asli daerah (X_1) dan belanja modal (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) di Kabupaten Halmahera Barat. Sedangkan menurut Hasna (2019) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan, dari latar belakang tersebut peneliti berinisiatif melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tengah”**

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

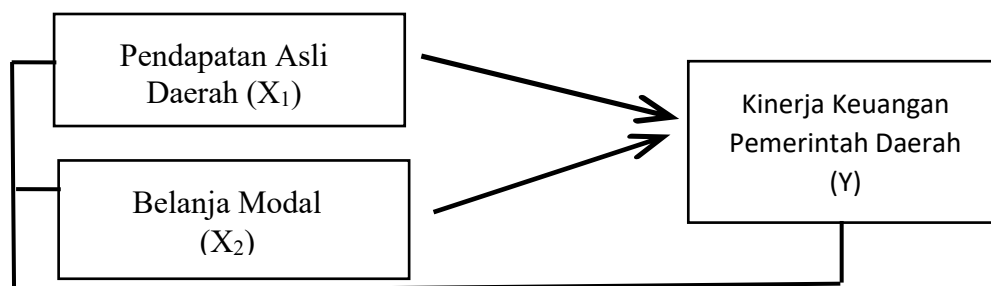
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Modal

Belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah yang bersifat menambah aset tetap dengan memberikan manfaat lebih dari satu periode dalam rangka pembentukan modal termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan guna mempertahankan masa manfaat dan meningkatkan kualitas aset.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1 : Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- H1a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- H1b : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif bersifat asosiatif kausal. Waktu yang dipakai penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022 sampai Juli 2025. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tengah.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Maluku Tengah yang beralamat di Jalan Geser No.4, Namaelo, Kec. Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Sumber dan Metode Pengumpulan data

Menggunakan data sekunder yaitu data-data yang didapat dari data BPS dan BPKAD Kabupaten Maluku Tengah, dokumen-dokumen resmi langsung dari BPKAD Kabupaten Maluku Tengah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Output Data Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	11	24370.00	120250.00	72951.8182	24240.73960
X2	11	205980.00	377360.00	308220.9091	64218.14751
Y	11	-.44	1.16	.2784	.50719
Valid N (listwise)	11				

Sumber: **Data sekunder yang diolah, 2022**

Berdasarkan tabel 1, statistik deskriptif dari variabel penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Variabel X₁ sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah sampel 11 memiliki nilai minimum senilai 24370.00, nilai maksimum sebesar 120250.00, nilai rata-rata sebesar 72951.8182 dan standar deviasi sebesar 24240.73960.
2. Variabel X₂ sebagai variabel Belanja Modal dengan jumlah sampel 11 memiliki nilai minimum senilai 205980.00, nilai maksimum sebesar 377360.00, nilai rata-rata senilai 308220.9091, dan standar deviasi sebesar 64218.14751.
3. Variabel Y sebagai variabel Kinerja Keuangan dengan jumlah sampel 11 memiliki nilai minimum senilai -0.44, nilai maksimum sebesar 1.16, nilai rata-rata sebesar 0.2784 dan nilai standar deviasi sebesar 0.50719.

Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40895755
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.129
	Negative	-.168
Test Statistic		.168
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 743671174.		

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Hasil pengujian normalitas pada tabel 2, menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai *asympt sig* yang di peroleh 0,200 lebih besar dari 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,668	.415		6.425	.001		
	Total X1	1.072E-5	.000	.532	2.728	.034	.614	1.630
	Total X2	-9.624E-6	.000	-1.159	-5.947	.001	.614	1.630

a. Dependent Variable: Total Y

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Berdasarkan Tabel 3, bahwa nilai VIF dari kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian diketahui nilai Toleransi di atas 0,1 dan VIF kurang dari 10 yang berarti kedua variabel tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.107	.212		-.503	.633
	Total X1	-2.459E-6	.000	-.529	-1.223	.267
	Total X2	1.346E-6	.000	.703	1.626	.155

a. Dependent Variable: Total Y

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Tabel 4 diketahui hasil hetesrokedastisitas sebagai berikut:

1. Pada variabel X₁ diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,267 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas.
2. Pada variabel X₂ diketahui bahwa nilai signifikan sebesar $0,155 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.927 ^a	.860	.814	.23231	2.246

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Berdasarkan tabel 5, diketahui hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* yaitu 2,446 dimana dengan jumlah N= 11 dan k= 2 diketahui nilai $d_L = 0.7580$ dan nilai $d_U = 1.6044$. Berdasarkan hasil uji tersebut maka diketahui bahwa letak nilai d_w berada diantara $d_U = 1.6044$ dan $4-d_u = 2,3956$. Sehingga sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan maka diputuskan bahwa tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.668	.415		6.425
	Total_X1	1.072E-5	.000	.532	2.728
	Total_X2	-9.624E-6	.000	-1.159	-5.947

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil regresi linier berganda memiliki nilai koefisien yang berbeda diantara variabel independen yang satu dengan yang lain. koefisien dari X_1 adalah 1.072E-5 dan X_2 adalah -9.624E-6, sedangkan nilai konstanta adalah 2.668.

Dari hasil tersebut diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2.668 + 1.072E-5 X_1 - 9.624E-6 X_2 + e$$

Interpretasi dari model persamaan regresi linier berganda tersebut adalah:

1. Nilai konstanta pada model persamaan linier berganda tersebut adalah 2.668 yang berarti apabila nilai seluruh variabel independen bernilai konstan maka Kinerja Keuangan (Y) adalah 2.668.
2. Nilai koefisien dari X_1 sebagai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada model persamaan regresi linier berganda adalah 1.072E-5, yang berarti apabila X_1 bernilai konstan maka Kinerja Keuangan akan menurun sebesar 1.072E-5.
3. Nilai koefisien dari X_2 sebagai variabel Belanja Modal pada model persamaan regresi linier berganda adalah -9.624E-6 yang berarti apabila X_2 bernilai Konstan maka Kinerja Keuangan akan meningkat sebesar -9.624E-6.

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1.991	2	.996	18.450
	Residual	.324	6	.054	
	Total	2.315	8		

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 18.450 dan nilai sig.f sebesar $0,003 < 0,05$ artinya bahwa H_1 di terima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa secara simultan variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjust R²*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.860	.814	.23231

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa pada kolom nilai *R Squared* adalah 0,814 atau 81,4% yang artinya variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal memiliki pengaruh sebesar 81,4% terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan. Sehingga sebanyak 18,6% di pengaruhi variabel lain.

Uji t

Tabel 8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.668	.415		6.425
	Total X1	1.072E-5	.000	.532	2.728
	Total X2	-9.624E-6	.000	-1.159	-5.947

Sumber: **Data Sekunder yang diolah, 2024**

Uji hipotesis secara parsial dapat dijelaskan sesuai tabel 8 sebagai berikut:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien sebesar 1.072E-5 dengan nilai sig.t 0,034 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 0,034 lebih kecil dari nilai *alpha* (0,05) yang ditetapkan, Pengambil keputusannya ialah apabila sig.t lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H_{1a} di Terima sedangkan H_0 ditolak, maka secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y). Yang berarti bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan maka Kinerja Keuangan akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yulianti, dkk (2018), Hasna (2019) dan Ni Putu (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Diketahui bahwa Belanja Modal memiliki nilai koefisien variabel independen sebesar -9.624E-6 dengan nilai sig.t 0,001 hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 0,001 lebih kecil dari nilai *alpha* (0,05) yang ditetapkan, artinya bahwa apabila sig.t lebih kecil dari 0,05. maka H_{1b} di Terima dan H_0 di Tolak. Yang artinya bahwa secara parsial variabel Belanja Modal (X_2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y). Artinya apabila Belanja Modal mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan akan penurunan. Sebaliknya, apabila Belanja Modal mengalami penurunan maka Kinerja Keuangan akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ni Putu (2018) yang membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Modal terhadap Efektivitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu sampel yang digunakan dalam penelitian terbatas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada periode 2013-2023 dan Variabel yang digunakan hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sedangkan masih banyak variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah.

Saran

Peneliti memiliki beberapa saran untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan periode yang lebih banyak memperoleh data seperti bulanan ataupun dalam triwulan
2. Diharapkan menambahkan variabel lain seperti rasio keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah, rasio efisiensi dan rasio efektivitas

DAFTAR PUSTAKA

- Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”
E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 2, 2018: 1080-1110 ISSN : 2302-8912
DOI: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko , dan Jacline I. Sumual, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat”
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 05 Tahun 2018 *Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/21490>
- Hasna Lathifa, Haryanto 1, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017”. **DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman 1** <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004 “Tentang Otonomi Daerah”
Permendagri No 13 tahun 2006 “tentang pedoman pengurusan, Pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 “tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.
- Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2017 “Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah”.
- Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 “tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18”.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 “tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan daerah”.
- undang-undang nomor 25 Tahun 1999 “Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”
undang-undang nomor 22 tahun 1999 “tentang Pemerintah Daerah dan untuk menjelaskan posisi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat”
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 “tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. (2000).Jakarta.
- PSAP Nomor 02 “Tentang Belanja Modal”.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 “tentang Peran Belanja Modal”
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 “Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah”. (2006). Jakarta.
- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 “tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja”
- PP No. 105 tahun 2000 “tentang keuangan daerah”

PP Nomor 58 tahun 2005 dan UU Nomor 23 tahun 2014 “tentang keuangan daerah”
[https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/17/120000969/keuangan-daerah--
pengertian-sumber-dan-prinsipnya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/17/120000969/keuangan-daerah--pengertian-sumber-dan-prinsipnya?page=all)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 156 ayat 1, “tentang Pemerintahan Daerah”
PP Nomor 58 tahun 2005 pasal 2 “tentang pengelolaan keuangan daerah”
UU Nomor 33 tahun 2004 “tentang penetapan landasan dalam penataan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah”